

SIARAN PERS

Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Bappenas Kembali Menggelar Seminar Internasional 2015: “*Fiscal Reform to Support Strong and Equitable Growth*”

Denpasar, 11 Desember 2015

Menteri Keuangan Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro dalam pidatonya di Seminar Internasional Kementerian Keuangan di Bali pada 11 Desember 2015 mengatakan bahwa Indonesia perlu segera menuntaskan reformasi di bidang perpajakan. Hal ini mengingat di Indonesia, perpajakan tidak hanya digunakan sebagai alat kebijakan di bidang fiskal namun juga sebagai sumber utama pendapatan negara untuk mendanai belanja negara dan pembangunan. Sebagai sumber utama pendapatan negara, Indonesia tidak lagi memiliki keleluasaan untuk mengandalkan sumber pendapatan dari sumber daya alam. Selain karena sumber ini terbatas juga karena rentan atas volatilitas harga atas komoditas sumber daya alam ini.

Penerimaan perpajakan merupakan sumber yang lebih sustainable. Namun demikian, kemampuan negara untuk memungut pajak dari aktivitas ekonomi menunjukkan kecenderungan penurunan. Salah satu indikatornya ialah masih rendahnya nilai tax ratio Indonesia yang tidak bergerak dari sekitar 12 persen. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa reformasi perpajakan bukan perkara yang mudah karena hal ini bukan murni isu ekonomi tetapi lebih kepada isu ekonomi politik. Perlu dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan iklim pemungutan perpajakan yang sehat.

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa ada hal yang berbeda dengan beberapa negara maju yang menjadikannya Indonesia mengalami kesulitan dalam mereformasi perpajakannya terutama dalam hal meningkatkan tingkat tax ratio. Di Indonesia, untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak terhambat oleh kelengkapan/akurasi data dan informasi. Hal ini antara lain yang disebabkan bahwa Indonesia masih menganut regulasi kerahasiaan bank (*bank secrecy*). Sementara di negara lain, seperti di Amerika Serikat, Internal Revenue Service (IRS) memiliki akses yang leluasa atas data perbankan untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Indonesia berencana untuk ikut serta secara aktif dalam inisiatif global tukar-menukar informasi perpajakan (*exchange of information*) yang akan dimulai tahun 2018. Konsekuensi dari kesepakatan ini maka regulasi mengenai kerahasiaan bank (*bank secrecy*) akan berakhir pada 2017.

Isu kedua dalam reformasi perpajakan ialah bagaimana memperluas basis pajak (ekstensifikasi perpajakan) terutama terkait pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini mengingat masih rendahnya pembayar pajak orang pribadi di Indonesia sehingga kontribusinya masih relatif kecil. Terlebih masih banyak perilaku masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya pajak.

Selain itu, dalam sesi terakhir forum internasional Kementerian Keuangan ini juga dihadiri oleh Mr. Paul Grigson (Duta Besar Australia) dan Mr. John Hewson (mantan Ketua Partai Liberal Australia, Ketua the Crawford School Tax and Transfer Policy Institute Australia National University).

Mr. Paul Grigson mengemukakan bahwa Australia menyambut baik dan secara sungguh-sungguh untuk memperkokoh kerja sama dua negara Indonesia dan Australia dalam skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Sementara Mr. John Hewson berbagi pengalaman mengenai bagaimana Australia mereformasi sistem perpajakannya. Antara lain beliau menyampaikan perlunya mengelola ekspektasi publik secara baik, meyakinkan mereka bahwa reformasi yang dijalankan ialah untuk kesejahteraan masyarakat. Perlunya mengelola proses transisi ini melampaui isu-isu politik yang menyertainya. Pada akhirnya, reformasi dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian bangsa. Sebagai konsekuensinya maka konsistensi proses reformasi harus terus berjalan baik dalam kondisi perekonomian yang sedang kurang baik atau pun perekonomian sedang dalam kondisi yang baik. Karena biasanya, ketika perekonomian sedang dalam kondisi yang baik kita melupakan proses reformasi ini.

-selesai-